



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA 2017



**ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KEMASYARAKATAN DAN PROTOKOL
DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET
2018**



@setkabgoid



@SetkabRI



@Sekretariat.Kabinet



Sekretariat Kabinet

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
KATA PENGANTAR.....	4
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar belakang	7
B. Gambaran Organisasi	8
C. Gambaran aspek strategis (<i>strategic issued</i>)	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Gambaran umum perencanaan kinerja.....	12
B. Ringkasan/Ikhtisar Penetapan Kinerja	13
C. Ikhtisar IKU Tahun 2017.	14
BAB III CAPAIAN KINERJA.....	17
A. Capaian kinerja	18
B. Realisasi anggaran	29
BAB IV PENUTUP	34
A. Simpulan umum atas capaian kinerja	34
B. Langkah-langkah/rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja	34
LAMPIRAN.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Capaian Indikator Kinerja Asdep Humas dan Protokol Tahun 2017	6
Tabel 2: Perjanjian Kinerja Asdep Humas dan Protokol Tahun 2017.....	13
Tabel 3: Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Humas dan Protokol Tahun 2017.....	14
Tabel 4: Kategori Pencapaian Kinerja Asdep Humas dan Protokol Tahun 2017.....	18
Tabel 5: Perbandingan Indikator Kinerja Asdep Humas dan Protokol Tahun 2016 dan 2017.....	19
Tabel 6: Capaian Kinerja Asdep Humas dan Protokol Tahun 2017.....	21
Tabel 7: Daftar Pertanyaan Survei Kepuasan Terhadap Pelayanan Permohonan Informasi Hasil Peliputan Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	24
Tabel 8: Rekapitulasi Survei Kepuasan Terhadap Pelayanan Permohonan Informasi Hasil Peliputan Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	25
Tabel 9: Instrumen Survei Kepuasan Terhadap Layanan Keprotokolan Tahun 2017.....	28
Tabel 10: Realisasi Penggunaan Anggaran Asdep Humas dan Protokol Tahun 2017.....	31
Tabel 11: Efisiensi Penggunaan Anggaran Asdep Humas dan Protokol Tahun 2017.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi Asdep Humas dan Protokol	9
Gambar 2: Laman Resmi dan Akun Media Sosial Sekretariat Kabinet	22
Gambar 3: Form Permohonan Informasi Hasil Peliputan Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	23
Gambar 4: Suasana Rapat/Pertemuan yang Dihadiri/Dipimpin oleh Sekretaris Kabinet.....	27

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol Tahun 2017 disusun sebagai bentuk komitmen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis unit kerja secara transparan dan akuntabel kepada *stakeholders* dan masyarakat.

Dalam laporan kinerja ini disajikan informasi yang akurat tentang keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2017 sebagai ukuran kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang ditunjang dengan pencapaian sasaran strategis, program, dan kegiatan. Laporan ini juga dilengkapi dengan analisis atas capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan menyangkut keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam laporan ini dapat dijadikan masukan bagi perbaikan secara berkelanjutan untuk penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, guna mewujudkan organisasi yang berorientasi pada hasil sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada *stakeholders* dan masyarakat serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Jakarta, Januari 2018



Al Furkon Setiawan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Komitmen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerja yang telah diperjanjikan kepada *stakeholders* dan masyarakat digambarkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol (Asdep Humas dan Protokol) Tahun 2017. Laporan ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Asdep Humas dan Protokol Tahun 2015-2019 yang dijabarkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017.

Secara keseluruhan Asdep Humas dan Protokol telah berhasil memenuhi kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2017. Dari 2 (dua) indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja pada tahun 2017, semuanya memiliki tingkat capaian sangat baik (85%-100%). Keberhasilan tersebut merupakan wujud komitmen Asdep Humas dan Protokol untuk melakukan penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi pelaksanaan keprotokolan terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet serta rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden, yang berkualitas yang merupakan sasaran strategis unit kerja pada periode 2015-2019. Di tahun 2017, yang merupakan medio pelaksanaan rencana jangka menengah 2015-2019, Asdep Humas dan Protokol telah berhasil memperkuat pondasi penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi pelaksanaan keprotokolan terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet serta rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden yang berkualitas yang ditunjukkan oleh aspek kecepatan, keakuratan, keutuhan, dan kepuasan *stakeholders* dalam pemanfaatan *output* yang dihasilkan.

Dari sisi penggunaan anggaran, pada tahun 2017 Asdep Humas dan Protokol mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp3.323.179.000 (tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Dana

yang diperoleh dialokasikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp3.274.936.219 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) atau 98,54%.

Tabel 1: Capaian Indikator Kinerja Asdep Humas dan Protokol Tahun 2017

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	% Capaian	Kategori Pencapaian
1	2	3	4	5
Terselenggaranya Hubungan Kemasyarakatan dan Keprotokolan Sekretariat Kabinet yang Berkualitas	Persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	100,00%	86,40%	Sangat Baik
	Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka dukungan kegiatan yang dihadiri oleh Presiden	100,00%	90,92	Sangat Baik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pelaporan kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu kunci untuk menjamin terselenggaranya pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, efisien, dan juga efektif. Penyusunan Laporan kinerja (LKj) juga dilakukan untuk mengetahui kemampuan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi yang dikembangkan melalui sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme, dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para *stakeholders* dan masyarakat yang dituangkan melalui Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis untuk jangka menengah yang kemudian dijabarkan dalam rencana, penetapan, serta pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pelaporan kinerja yang dituangkan ke dalam bentuk LKj merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama dari suatu instansi pemerintah dan mencakup berbagai aspek yang meliputi uraian pertanggungjawaban mengenai aspek keuangan, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta metode kerja, pengendalian manajemen, dan kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan tugas utama instansi.

Penyusunan LKj Asdep Humas dan Protokol 2017 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun

2017. LKj ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Asdep Humas dan Protokol pada tahun mendatang.

B. Gambaran Organisasi

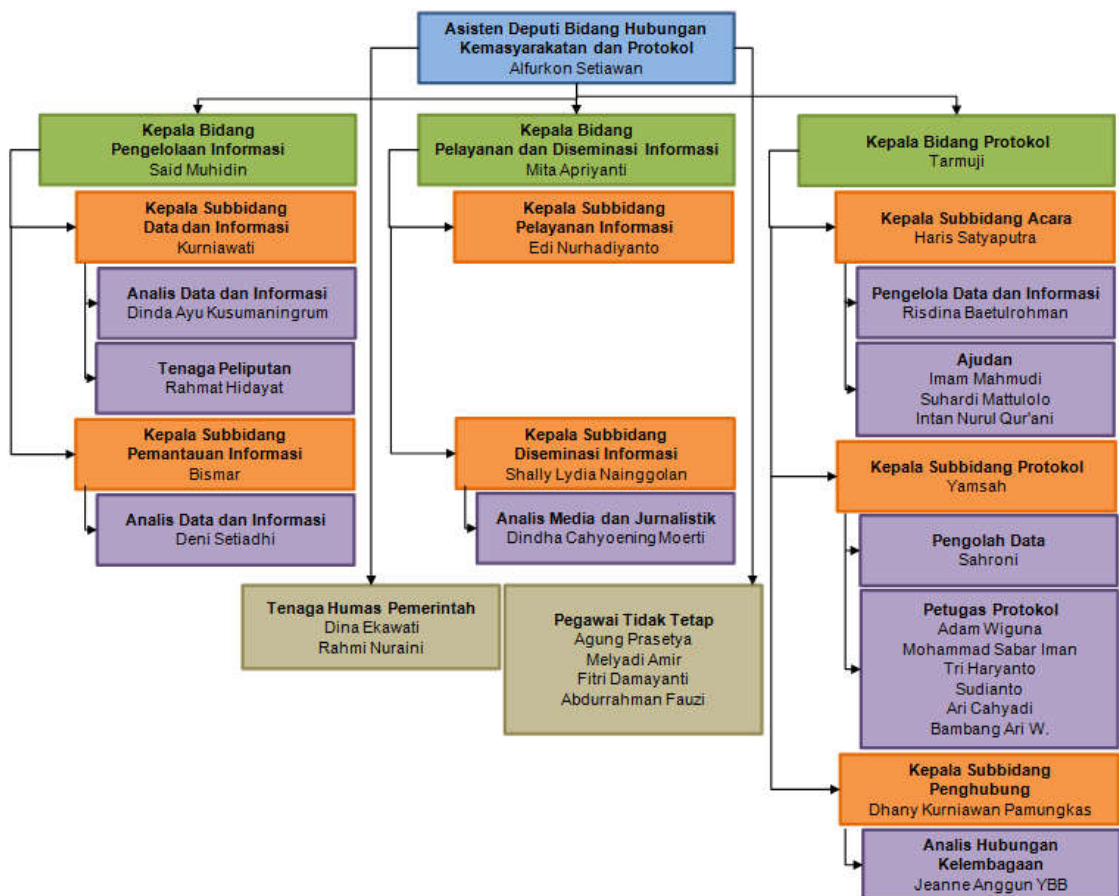
Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol dibentuk pada tanggal 19 Juni 2015, berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Berdasarkan Perseskab 4/2015 tersebut, Asdep Humas dan Protokol berada dan bertanggung jawab secara langsung kepada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet serta mempunyai tugas melaksanakan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi pelaksanaan keprotokolan rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asdep Humas dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan kebijakan hubungan kemasyarakatan, penyusunan komunikasi hubungan kemasyarakatan, peliputan, pengidentifikasian, pengklasifikasian, dan pengolahan informasi, serta pemantauan dan evaluasi media berkaitan dengan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet;
2. peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet;
3. penyebarluasan informasi dan pemberian layanan informasi, pengelolaan media serta pengoordinasian penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan yang berkaitan dengan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet;
4. penyiapan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet serta koordinasi pelaksanaan keprotokolan rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden;

5. pelaksanaan koordinasi antar unit kesekretariatan lembaga negara dan kementerian/lembaga dalam rangka mendukung acara, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Adapun struktur organisasi Asdep Humas dan Protokol dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1: Struktur Organisasi Asdep Humas dan Protokol

C. Gambaran aspek strategis (*strategic issued*)

Asdep Humas dan Protokol memiliki visi “**menjadi Asisten Deputi yang profesional dan handal dalam penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan protokol guna mendukung kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet**”. Adapun rumusan misinya adalah:

1. **Mengelola informasi secara maksimal terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;**
2. **Melayani dan mendiseminasikan informasi secara maksimal terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;**
3. **Memberikan dukungan keprotokolanan bagi Sekretaris Kabinet dalam rangka dukungan kegiatan yang dihadiri oleh Presiden secara maksimal.**

Berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkanlah tujuan strategis sebagai hasil akhir jangka panjang yang ingin diperoleh oleh unit kerja. Tujuan strategis yang ditetapkan adalah “**meningkatnya kualitas pelaksanaan hubungan kemasyarakatan dan protokol terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet**”

Selanjutnya, ditetapkan sasaran strategis yaitu “**terwujudnya penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi pelaksanaan keprotokolanan terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet serta rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet yang berkualitas**”.

Visi, misi, serta tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Asdep Humas dan Protokol Tahun 2015-2019 tersebut merupakan pedoman unit kerja dalam merencanakan kinerja setiap tahunnya.

Dalam menetapkan dan mencapai tujuan serta sasaran strategis, bertumpu pada kekuatan sebagai berikut:

1. **Keterbukaan dan kerja sama pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis**, sebagai potensi dasar utama untuk mewujudkan manajemen

yang efektif, efisien, profesional, modern, akuntabel, serta berlandaskan asas-asas tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mendukung upaya peningkatan kinerja organisasi, terutama di tingkat unit kerja.

2. **Kebijakan organisasi**, berupa pembakuan (formalisasi) metode kerja sama dan koordinasi antar unit kerja sebagai faktor penting untuk menciptakan program dan kegiatan yang terarah, terpadu, efektif, dan efisien.
3. **Sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan kompeten**, sebagai pilar organisasi yang diperlukan guna mencapai tujuan organisasi.
4. **Anggaran berbasis kinerja**, sebagai salah satu penunjang keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan unit kerja.
5. **Sarana dan prasarana**, sebagai pendukung program kerja unit organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran umum perencanaan kinerja

Pada tahun 2017, Asdep Humas dan Protokol menyelenggarakan 1 (satu) program, yaitu **“Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan”**. Program tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 1 (satu) kegiatan, yaitu **“Dukungan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan penyiapan keprotokolan rapat, pertemuan, atau kegiatan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet serta koordinasi pelaksanaan keprotokolan rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden”**. Kegiatan tersebut kemudian dijabarkan dalam **3 (tiga) sub kegiatan** sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja, yaitu:

1. Penyusunan strategi hubungan kemasyarakatan, peliputan dan pengolahan Informasi, serta pemantauan media (631), termasuk ke dalam layanan hubungan kemasyarakatan dan komunikasi;
2. Penyebarluasan dan pelayanan informasi, pengelolaan media, serta penyelenggaraan koordinasi hubungan kemasyarakatan (632), termasuk ke dalam layanan hubungan kemasyarakatan dan komunikasi; dan
3. Pelayanan keprotokolan dan dukungan administrasi acara Sekretaris Kabinet, serta koordinasi antar kesekretariatan kementerian/lembaga (633), termasuk ke dalam layanan protokoler.

B. Ringkasan/Ikhtisar Penetapan Kinerja

Pada tahun 2017, kinerja Asdep Humas dan Protokol dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan visi dan misi organisasi diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Asdep Humas dan Protokol Tahun 2017 (Tabel 2).

Tabel 2: Perjanjian Kinerja Asdep Humas dan Protokol Tahun 2017

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Terselenggaranya Hubungan Kemasyarakatan dan Keprotokolan Sekretariat Kabinet yang Berkualitas	Persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	100,00%
	Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka dukungan kegiatan yang dihadiri oleh Presiden	100,00%

Indikator kinerja “**persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet**” digunakan untuk mengukur kemampuan Asdep Humas dan Protokol untuk memenuhi ekspektasi *stakeholders* dalam memberikan pelayanan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet baik dalam bentuk berita, infografis, transkripsi, foto, serta video melalui laman resmi, media sosial, dan sarana publikasi lainnya. Aspek persyaratan, prosedur, dan ketepatan waktu pelayanan merupakan parameter yang digunakan dalam mengukur kepuasan terhadap permohonan informasi. Demikian juga dengan aspek sumber daya manusia dan juga kualitas dari informasi yang dihasilkan, juga digunakan untuk menjadi parameter penilaian kemampuan Asdep Humas dan Protokol.

Indikator kinerja “persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka dukungan kegiatan yang dihadiri oleh Presiden” adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan keprotokolan dalam menunjang kelancaran rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet dalam rangka dukungan kegiatan yang dihadiri oleh Presiden baik sebelum, saat, ataupun sesudah kegiatan berlangsung.

Target capaian masing-masing indikator kinerja ditetapkan dengan memperhatikan dan mengevaluasi capaian indikator kinerja sejenis pada tahun-tahun sebelumnya, serta dengan memperhatikan dinamika yang berkembang terkait ritme kerja pemerintahan saat ini.

C. Ikhtisar IKU Tahun 2017.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicator* adalah tolok ukur yang ditetapkan dalam menilai keberhasilan dari suatu sasaran dan tujuan strategis organisasi. Keberhasilan Asdep Humas dan Protokol dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis dipengaruhi oleh 2 (dua) IKU sebagaimana yang terdapat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3: Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Humas dan Protokol Tahun 2017

No	Uraian	Alasan	Sasaran Strategis
1	2	3	4
1	Persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	Mengukur kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan informasi berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretaris Kabinet berupa berita, transkripsi, foto, video, foto, infografis, dll	Terselenggaranya Hubungan Kemasyarakatan dan Keprotokolan Sekretariat Kabinet yang Berkualitas

No	Uraian	Alasan	Sasaran Strategis
1	2	3	4
2	Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka dukungan kegiatan yang dihadiri oleh Presiden	Mengukur kinerja organisasi dalam memberikan layanan keprotokolan dan penyelenggaraan acara kepada Sekretaris Kabinet	

Dari 2 (dua) indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Asdep Humas dan Protokol, 1 (satu) indikator yaitu “persentase **kepuasan** terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet” digunakan untuk mengukur kemampuan Asdep Humas dan Protokol dalam menghasilkan dan menyebarkan *output* berupa informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang berkualitas, yang tercermin dari aspek kepuasan para *stakeholders* yang merupakan *outcome* dari pelayanan yang dilakukan. Selain kualitas *output* yang dihasilkan, kemudahan prosedur pelayanan serta kehandalan sumber daya manusia juga menjadi parameter dalam mengukur tingkat kepuasan para *stakeholders* tersebut.

Sedangkan 1 (dua) indikator lainnya yaitu “persentase **kepuasan** terhadap layanan keprotokolan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka dukungan kegiatan yang dihadiri oleh Presiden” menunjukkan kemanfaatan (*outcome*) serta kepuasan *stakeholders* terhadap pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan acara yang dihasilkan oleh Asdep Humas dan Protokol.

Kedua indikator ini digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur kemampuan unit kerja dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dari sisi **anggaran**, pada tahun 2017 Asdep Humas dan Protokol mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp3.323.179.000 (tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) pagu awal, yang kemudian direvisi menjadi Rp2.779.200.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan Rp543.979.000 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tambahan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

BAB III

CAPAIAN KINERJA

Laporan kinerja Asdep Humas dan Protokol Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target-target yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Asdep Humas dan Protokol yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja sebagai penerima mandat dan atasan pimpinan unit kerja sebagai pemberi mandat. Oleh karena itu, pengungkapan dan penyajian akuntabilitas kinerja dalam laporan kinerja harus berdasarkan pada hasil pengukuran kinerja sesuai dengan hierarki akuntabilitas kinerja yang ada.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas perbandingan antara sesuatu dengan alat ukurnya. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Selain analisis capaian kinerja, proses pengukuran kinerja perlu dilengkapi dengan evaluasi atas hasil capaian kinerja. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui progres realisasi kinerja yang dihasilkan maupun kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai sasaran serta menilai efisiensi, efektivitas, keekonomisan maupun perbedaan kinerja sebagai umpan balik untuk mengetahui pencapaian implementasi perencanaan strategis.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasi, yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100 \%$$

RUMUS 1

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100$$

RUMUS 2

Penilaian atas capaian kinerja Asdep Humas dan Protokol tahun 2017 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 4: Kategori Pencapaian Kinerja Asdep Humas dan Protokol Tahun 2017

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	2	3
1.	> 100	Memuaskan
2.	85% - 100%	Sangat Baik
3.	70% - < 85%	Baik
4.	55% - < 70%	Cukup
5.	< 55%	Kurang Baik

A. Capaian kinerja

Sebagaimana dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) Asdep Humas dan Protokol Tahun 2015-2019, sasaran strategis jangka menengah Asdep Humas dan Protokol adalah “terwujudnya penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi pelaksanaan keprotokolan terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet serta rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet yang

berkualitas". Sasaran strategis tersebut merupakan pedoman unit kerja dalam merencanakan kinerja setiap tahunnya. Jika pada tahun 2016, kinerja Asdep Humas dan Protokol diukur dengan 2 (dua) indikator *output* yaitu **ketepatan** waktu dalam menyelesaikan pengelolaan **dan keakuratan** informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan serta 2 (dua) indikator *outcome* yaitu **kepuasan** terhadap penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet dan **kepuasan** terhadap layanan keprotokolan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka dukungan kegiatan yang dihadiri oleh Presiden, maka tahun 2017 ini, sebagai tahun ketiga dalam rangka pemenuhan sasaran strategis jangka menengah Asdep Humas dan Protokol, pengukuran kinerja Asdep Humas dan Protokol difokuskan pada **kepuasan stakeholders** terhadap layanan informasi dan keprotokolan yang dilakukan. Asdep Humas dan Protokol terus melakukan perbaikan kualitas dari segi produk, prosedur pelayanan, dan sumber daya manusia untuk dapat terus meningkatkan tingkat kepuasan *stakeholders* tersebut. Hal ini sesuai dengan sasaran strategis unit kerja yang tercantum dalam Renstra Asdep Humas dan Protokol periode 2015-2019, yaitu terselenggaranya hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan Sekretariat Kabinet yang berkualitas.

Tabel 5: Perbandingan Indikator Kinerja Asdep Humas dan Protokol Tahun 2016 dan 2017

Indikator Kinerja		2016	2017	Keterangan
Deskripsi	Jenis			
1	2	3	4	5
Persentase penyelesaian pengelolaan informasi secara tepat waktu terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	<i>Output</i>	Ya	Tidak	
Persentase kepuasan terhadap penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	<i>Outcome</i>	Ya	Tidak	Diukur pada Indikator Kinerja Setkab 2017

Indikator Kinerja		2016	2017	Keterangan
Deskripsi	Jenis			
1	2	3	4	5
Persentase informasi kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan secara akurat	<i>Output</i>	Ya	Tidak	
Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka dukungan kegiatan yang dihadiri oleh Presiden	<i>Outcome</i>	Ya	Ya	
Persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	<i>Outcome</i>	Tidak	Ya	

Sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja terhadap pencapaian sasaran strategisnya, dalam laporan ini selain dilakukan perbandingan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja juga dilakukan perbandingan tingkat capaian indikator kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra yang sama.

Tabel 6 berikut ini menggambarkan capaian kinerja Asdep Humas dan Protokol Tahun 2017.

Tabel 6: Capaian Kinerja Asdep Humas dan Protokol Tahun 2017

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	% Capaian	Kategori Pencapaian
1	2	3	4	5
Terselenggaranya Hubungan Kemasyarakatan dan Keprotokolan Sekretariat Kabinet yang Berkualitas	Persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	100,00%	86,40%	Sangat Baik
	Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka dukungan kegiatan yang dihadiri oleh Presiden	100,00%	90,92	Sangat Baik

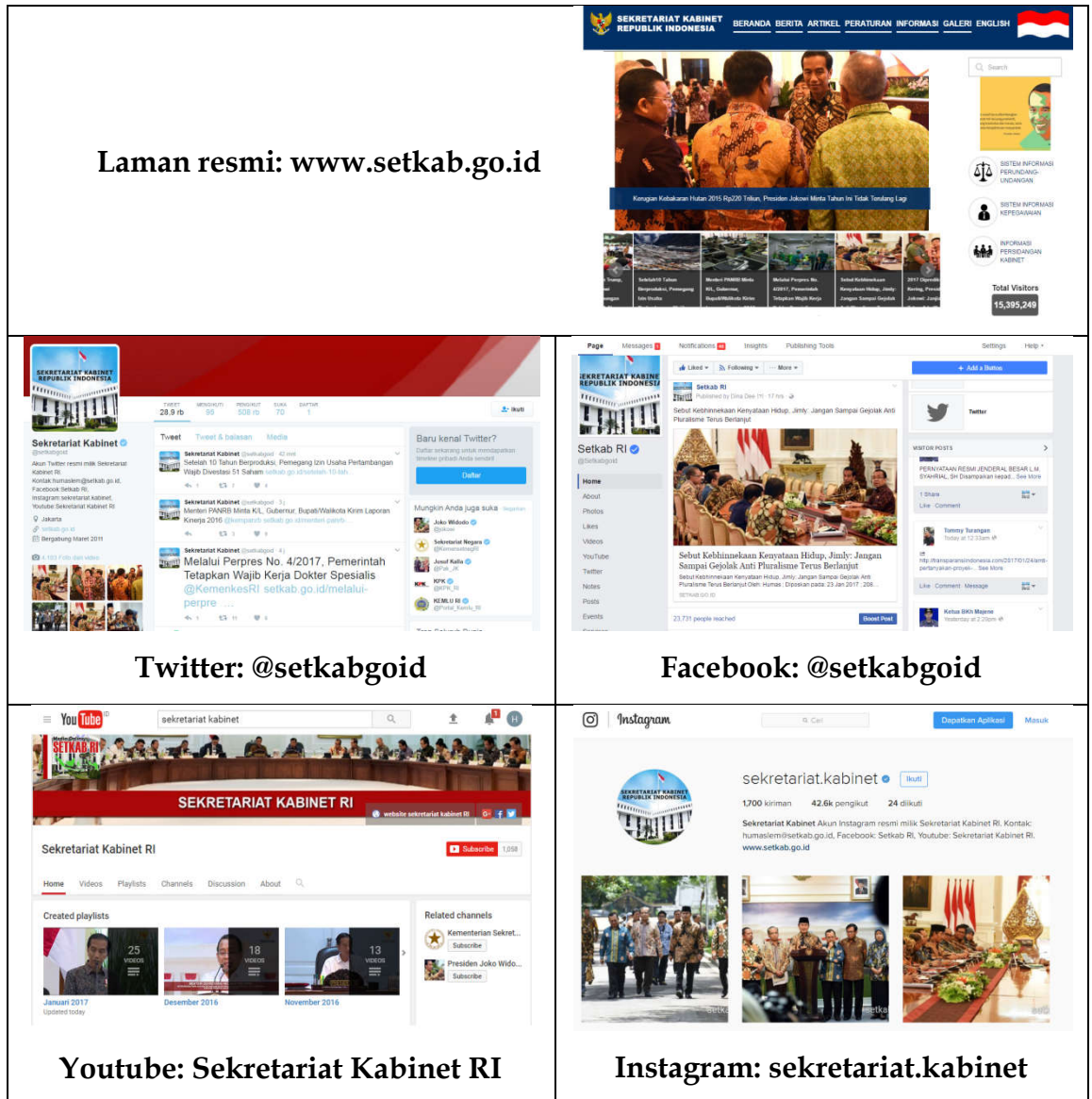
Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan Asdep Humas dan Protokol telah berhasil memenuhi penetapan kinerja yang telah diperjanjian sebelumnya di mana semua indikator kinerja yang diukur memiliki tingkat capaian sangat baik (persentase capaian 85%-100%).

Berikut adalah penjelasan tingkat capaian dari masing-masing indikator kinerja:

- 1. Persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet (persentase capaian = 86,40%)**

Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan Asdep Humas dan Protokol dalam memberikan pelayanan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet baik dalam bentuk berita, infografis, transkripsi, foto, serta video melalui laman resmi, media sosial, surat elektronik, maupun media publikasi lainnya. Saat ini

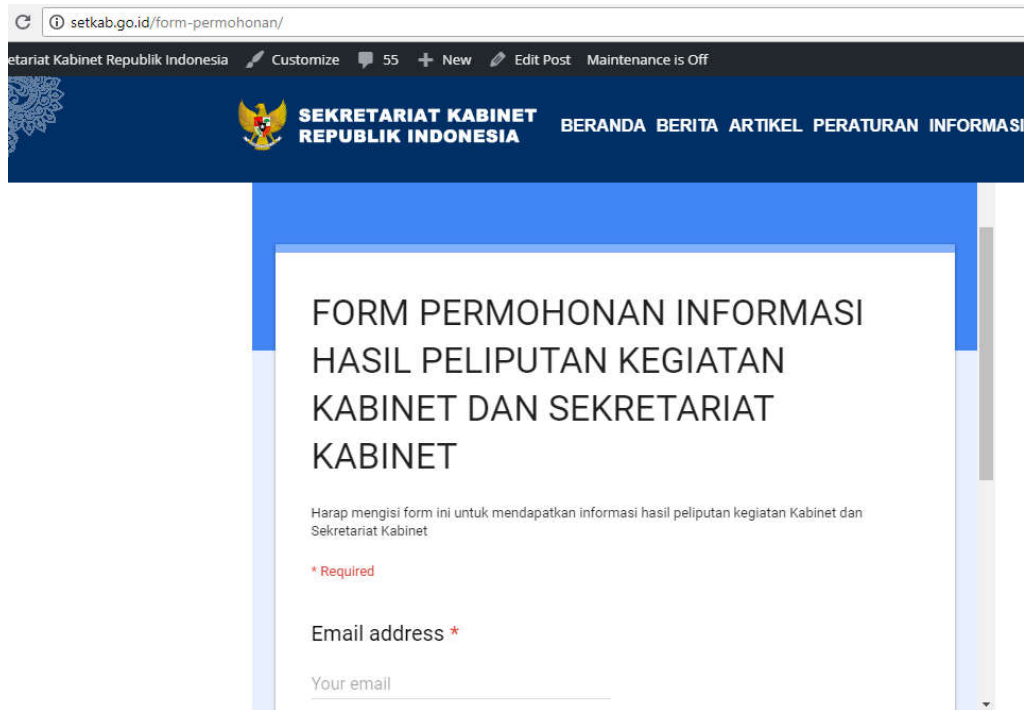
Sekretariat Kabinet memiliki laman resmi yang dapat diakses di www.setkab.go.id, serta 4 (empat) akun media sosial di platform facebook, youtube, twitter, dan instagram (Gambar 2).



Gambar 2: Laman Resmi dan Akun Media Sosial Sekretariat Kabinet

Selain media publikasi di atas, Sekretariat Kabinet juga menyediakan kanal bagi para *stakeholders* baik masyarakat umum, instansi pemerintah, pihak swasta, perwakilan negara sahabat, dan lain-lainnya yang ingin memperoleh informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet melalui tautan

www.setkab.go.id/form-permohonan (Gambar 3). Informasi yang diminta kemudian akan dikirimkan melalui surat elektronik, media berbagi data *online*, maupun link di laman setkab.go.id



The image shows a web browser window displaying a form on the website www.setkab.go.id. The browser's address bar shows the URL setkab.go.id/form-permohonan/. The website's header features the logo of the Sekretariat Kabinet Republik Indonesia and navigation links for BERANDA, BERITA, ARTIKEL, PERATURAN, and INFORMASI. The main content area contains the following text:

**FORM PERMOHONAN INFORMASI
HASIL PELIPUTAN KEGIATAN
KABINET DAN SEKRETARIAT
KABINET**

Harap mengisi form ini untuk mendapatkan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet

* Required

Email address *

Your email

Gambar 3: Form Permohonan Informasi Hasil Peliputan Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet

Untuk mengukur kepuasan para *stakeholders* tersebut terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet, dilakukan survei atau jajak kepada setiap pemohon informasi yang telah mengisi form permohonan sebagaimana pada gambar 3. Para pemohon informasi tersebut diminta untuk mengisi form survei atau jajak pendapat pada tautan www.setkab.go.id/form-survei. Hasil dari survei tersebut kemudian direkapitulasi pada akhir tahun 2017 untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet.

Terdapat 8 (delapan) pertanyaan yang harus dijawab responden, yang merepresentasikan tingkat kepuasannya terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet. Delapan pertanyaan tersebut mencakup aspek prosedur, waktu, produk, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, dan maklumat pelayanan, serta penanganan, pengaduan, saran, dan masukan terkait pelayanan yang diberikan. (Daftar pertanyaan pada Tabel 7)

Tabel 7: Daftar Pertanyaan Survei Kepuasan Terhadap Pelayanan Permohonan Informasi Hasil Peliputan Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet

No	Pertanyaan
1	2
1	Persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh layanan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet mudah
2	Prosedur pelayanan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet mudah
3	Pelayanan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet tepat waktu
4	Informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet memuaskan
5	Petugas pelayanan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet memiliki kemampuan yang memadai
6	Petugas pelayanan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet berperilaku baik dan sopan
7	Pelayanan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet sesuai dengan standar pelayanan yang sudah dijanjikan
8	Tindaklanjut terhadap pengaduan dan saran terhadap pelayanan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet memuaskan

Selama periode 2017, telah dilakukan survei kepada para pemohon informasi dan diperoleh 22 (dua puluh dua) responden dengan tingkat kepuasan terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet pada tahun 2017 sebesar **86,40%**. Berikut adalah perhitungan survei yang dilakukan:

Tabel 8: Rekapitulasi Survei Kepuasan Terhadap Pelayanan Permohonan Informasi Hasil Peliputan Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet

No	Pertanyaan	Ruang Lingkup	Tingkat Kepuasan	% Kepuasan
1	2	3	4	5
1	Persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh layanan informasi hasil peliputan kegiatan kabinet dan sekretariat kabinet mudah	Persyaratan	4,14	82,80%
2	Prosedur pelayanan informasi hasil peliputan kegiatan kabinet dan setkab mudah	Prosedur	4,18	83,60%
3	Pelayanan informasi hasil peliputan kegiatan kabinet dan setkab tepat waktu	Waktu Pelayanan	4,73	94,60%
4	Informasi hasil peliputan kegiatan kabinet dan setkab memuaskan	Produk Pelayanan	4,36	87,20%
5	Petugas pelayanan informasi hasil peliputan kegiatan kabinet dan setkab memiliki kemampuan yang memadai	Kompetensi Pelaksana	4,27	85,40%
6	Petugas pelayanan informasi hasil peliputan kegiatan kabinet dan setkab berperilaku baik dan sopan	Perilaku Pelaksana	4,32	86,40%

No	Pertanyaan	Ruang Lingkup	Tingkat Kepuasan	% Kepuasan
1	2	3	4	5
7	Pelayanan informasi hasil peliputan kegiatan kabinet dan setkab sesuai dengan standar pelayanan yang sudah dijanjikan	Maklumat Pelayanan	4,36	87,20%
8	Tindak lanjut terhadap pengaduan dan saran terhadap pelayanan informasi hasil peliputan kegiatan kabinet dan setkab memuaskan	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	4,18	83,60%
		Rata-rata	4,32	86,40%

Adapun penjelasan dari pencapaian indikator kinerja “**persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet**”, adalah sebagai berikut:

- a. Capaian indikator kinerja ini merupakan rata-rata hasil survei dari 22 (dua puluh dua) responden, yaitu 84,60%. Capaian indikator kinerja ini dihitung dengan menggunakan rumus 1. Dibandingkan dengan target 100% maka **capaiannya 86,40%, kategori capaian “Sangat Baik”**;
- b. Jika **pada tahun 2016** indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah “**persentase kepuasan terhadap penyebaran informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet**” dengan 1 (satu) buah pertanyaan survei terkait produk yang dihasilkan, maka **pada tahun 2017** ini ruang lingkup kinerja yang dinilai juga mencakup aspek prosedur, waktu, produk, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, dan maklumat pelayanan, serta penanganan, pengaduan, saran, dan masukan terkait pelayanan yang diberikan. Hal ini menunjukkan upaya Asdep Humas dan Protokol untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kehumasan,

yang merupakan sasaran strategis organisasi, tidak hanya dari segi produk tetapi juga prosedur pelayanan, sumber daya manusia, dan lainnya.

2. Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka dukungan kegiatan yang dihadiri oleh Presiden (tingkat capaian = 90,92%)

Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan Asdep Humas dan Protokol dalam memberikan layanan keprotokolan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka dukungan kegiatan yang dihadiri oleh Presiden.



Gambar 4: Suasana Rapat/Pertemuan yang Dihadiri/Dipimpin oleh Sekretaris Kabinet

Pada tahun 2017 indikator kinerja ini diukur melalui survei kepada peserta rapat/pertemuan yang dihadiri/dipimpin oleh Sekretaris Kabinet yang dilakukan secara berkala. Terdapat 13 (tiga belas) pertanyaan dengan 4 (empat) pilihan jawaban yang

mencerminkan kepuasan terhadap layanan keprotokolan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka dukungan kegiatan yang dihadiri oleh Presiden (Tabel 9) yang mencakup aspek layanan ruang tunggu, pelayanan acara, dan fasilitas yang digunakan

Tabel 9: Instrumen Survei Kepuasan Terhadap Layanan Keprotokolan Tahun 2017

Kriteria	Penjelasan
Jumlah pertanyaan	13 (tiga belas) buah pertanyaan
Pertanyaan	<ul style="list-style-type: none"> - Perilaku Protokol - Penerimaan - Pelayanan Audiensi/ Rapat - Informasi Waktu Audiensi/Rapat - Ruang Pertemuan - AC - Penerangan - Minuman dan Makanan Ringan - Desain Ruang Audiensi/Rapat - Kebersihan Ruang Audiensi/Rapat - Luas Audiensi/Rapat - Siaran TV - Kualitas <i>Wifi</i>
Pilihan jawaban	<ul style="list-style-type: none"> a. Sangat baik b. Baik c. Kurang baik d. Buruk
Pelaksanaan	Setiap acara audiensi/rapat
Perhitungan	<p>Dihitung setiap 3 (tiga) bulan. Jawaban a s.d b dijumlahkan untuk setiap pertanyaan, kemudian dibagi 13 (jumlah pertanyaan)</p> <p>Hasil Triwulan I: 93,33%, dengan jumlah responden 10 orang Hasil Triwulan II: 90,91%, dengan jumlah responden 22 orang Hasil Triwulan III: 94,12%, dengan jumlah responden 17 orang Hasil Triwulan IV: 85,33%, dengan jumlah responden 10 orang</p> <p>Capaian Tahun 2017 adalah sebesar 90,92%</p>

Berikut penjelasan dari pencapaian indikator kinerja **“tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka dukungan kegiatan yang dihadiri oleh Presiden”**:

- a. Capaian indikator kinerja ini merupakan rata-rata hasil survei dari triwulan I s.d. IV, yaitu 90,92%. Capaian indikator kinerja ini dihitung dengan menggunakan rumus 1. Dibandingkan dengan target 100% maka **capaiannya 90,92%, kategori capaian “Sangat Baik”**; dan
- b. Jika dibandingkan pada tahun 2016, dengan tingkat capaian 99,30% maka terdapat penurunan capaian sebesar 8,39%. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penyempurnaan metode perhitungan survei yang dilakukan pada tahun 2017. Jika pada tahun 2016 jawaban a, b, dan c dikategorikan menjadi memuaskan dengan bobot 1 dan jawaban d dikategorikan tidak memuaskan dengan bobot 0, maka pada tahun 2017, jawaban a diberi bobot 4, b berbobot 3, dan c berbobot 2, serta d berbobot 1. Pembobotan ini akan mengurangi tingkat capaian yang dihasilkan namun akan lebih mencerminkan kemampuan Asdep Humas dan Protokol dalam melakukan pelayanan.

B. Realisasi anggaran

Di dalam menyusun dan menetapkan anggaran, Asdep Humas dan Protokol telah berusaha dengan berdasarkan pada pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai atau dengan kata lain menyusun anggaran yang berorientasi pada penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan.

Pada tahun 2017, Asdep Humas dan Protokol mendapatkan **alokasi anggaran sebesar Rp3.323.179.000** (tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta

seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Dana yang diperoleh dialokasikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan **penyerapan anggaran sebesar Rp3.274.936.219** (tiga miliar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) atau 98,54%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terdapat peningkatan serapan anggaran sebesar 19,75 persen. Serapan yang hampir mencapai 100% dan persentase *output* yang mencapai 100% memperlihatkan bahwa Asdep Humas dan Protokol mampu melaksanakan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan.

Adapun realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Humas dan Protokol tahun 2017 berdasarkan jenis kegiatan dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10: Realisasi Penggunaan Anggaran Asdep Humas dan Protokol Tahun 2017

Indikator Kinerja							
Input (Dana)		Output			Outcome		
Target	Realisasi	Deskripsi	Target	Realisasi	Deskripsi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
2.096.170.000	2.053.332.246	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi ¹⁾	12 bulan layanan	12 bulan layanan	Persentase kepuasan terhadap pelayanan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	100%	89,40%
1.227.009.000	1.221.603.973	Layanan Protokoler ²⁾	12 bulan layanan	12 bulan layanan	Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka dukungan kegiatan yang dihadiri oleh Presiden	100%	90,92%
3.323.179.000	3.274.936.219						

- 1) Meliputi (1) Penyusunan Strategi Humas, Peliputan dan Pengolahan Informasi, serta Pemantauan Media dan (2) Penyebarluasan dan pelayanan informasi, pengelolaan media, serta penyelenggaraan koordinasi humas
- 2) Pelayanan Keprotokolan dan Dukungan Administrasi Acara Sekretaris Kabinet, serta Koordinasi Antar Kesekretariatan Kementerian Lembaga

Berikut adalah perhitungan keekonomisan, keefisienan, dan keefektifan penggunaan anggaran pada Asdep Humas dan Protokol:

1. Penghematan dana (keekonomisan)

Penghematan dana = (target dana - realisasi)/target dana * 100% = **1,45%**

2. Efisiensi penggunaan anggaran

Tabel 11: Efisiensi Penggunaan Anggaran Asdep Humas dan Protokol Tahun 2017

Output	Target				Realisasi				Efisiensi
	Input	Output		Input/Output	Input	Output		Input/Output	
	Dana	Jumlah	Satuan		Dana	Jumlah	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	2.096.170.000	12	Bulan Layanan	174.680.833	2.053.332.246	12	Bulan Layanan	171.111.021	2,04
Layanan Protokoler	1.227.009.000	12	Bulan Layanan	102.250.750	1.221.603.973	12	Bulan Layanan	101.800.331	0,44
Rata-rata efisiensi									

3. Efektivitas penggunaan anggaran (*Cost Effectiveness*)

Penggunaan anggaran disebut efektif apabila persentase capaian sasaran lebih besar dari target sasaran dan persentase efisiensi penggunaan anggaran. Karena persentase capaian sasaran Asdep Humas dan Protokol lebih besar dari persentase target dan efisiensinya maka penggunaan anggaran pada Asdep Humas dan Protokol sudah efektif.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan umum atas capaian kinerja

Secara keseluruhan Asdep Humas dan Protokol telah berhasil memenuhi penetapan kinerja yang telah diperjanjian sebelumnya. Dari 2 (dua) indikator kinerja utama yang diukur, yaitu “persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka dukungan kegiatan yang dihadiri oleh Presiden” dan “persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet” semuanya memiliki kategori tingkat capaian sangat baik. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan wujud komitmen Asdep Humas dan Protokol untuk melakukan penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan penyiapan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Sekretaris Kabinet yang berkualitas yang merupakan sasaran strategis unit kerja pada periode 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Renstra unit kerja periode 2015-2019. Kualitas tersebut ditandai dengan aspek kecepatan, ketepatan, keutuhan, dan pemanfaatan *output* yang dihasilkan.

Dari sisi penggunaan anggaran, pada tahun 2017, Asdep Humas dan Protokol menyerap anggaran sebesar **Rp3.274.936.219** (tiga miliar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) atau 98,54% dari **alokasi anggaran sebesar Rp3.323.179.000** (tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

B. Langkah-langkah/rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja

Secara keseluruhan Asdep Humas dan Protokol telah berhasil memenuhi komitmen kinerja yang diperjanjikan. Namun, dalam rangka terus melakukan perbaikan dalam kinerja Asdep Humas dan Protokol sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran strategis organisasi “**terwujudnya penyelenggaraan**

hubungan kemasyarakatan serta koordinasi pelaksanaan keprotokolan terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet serta rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet yang berkualitas”, langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) baik dari segi kualitas dan kuantitas melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berkala maupun pengadaan SDM;
2. Pengintensifan penggunaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi seperti surat elektronik (surel) maupun grup sosial yang terbukti mampu meningkatkan capaian kinerja Asdep Humas dan Protokol terutama dalam pengelolaan informasi untuk kemudian disebarluaskan melalui laman www.setkab.go.id dan media sosial Sekretariat Kabinet lainnya; dan
3. Diversifikasi penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet melalui berbagai kanal dan bentuk produk publikasi.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN
KEMASYARAKATAN DAN PROTOKOL**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
	Terselenggaranya Hubungan Kemasyarakatan dan Keprotokolan Sekretariat Kabinet yang Berkualitas	1. Persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	100%
		2. Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan penyiapan keprotokolan rapat, pertemuan atau kegiatan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet serta koordinasi pelaksanaan keprotokolan rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	
1. Layanan hubungan masyarakat dan komunikasi	Rp.1.552.191.000,00
2. Layanan Protokoler	Rp.1.447.809.000,00
Total Anggaran	Rp.3.000.000.000,00

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan
Kerja Kabinet

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Kemasyarakatan dan Protokol

ttd.

ttd.

Yuli Harsono

Al Furkon Setiawan